

Abstrak

Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasi. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Lalu Lintas, Pemerintah Daerah.

Abstract

Traffic issues are complex because traffic regulations are neutral and non-spiritual legal systems, encompassing two main tasks: maintaining public order and creating tranquility. Additionally, citizens generally desire freedom in using road facilities, while law enforcement officers are tasked with creating safety and order. However, there are still some roads frequented by vehicles that do not follow their designated lanes, as seen in the Puger District of Jember. This research aims to understand the government's policy under Article 24 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Damage Regulation in the Puger District, Jember Regency, caused by the traffic of large vehicles from factory areas. The research method used is Normative Juridical, with three approaches: First, the statute approach, involving the review of various laws and regulations. Second, the conceptual approach, focusing on the exploration and analysis of legal concepts developed in legal doctrines. Third, the case approach, which examines concrete cases relevant to the researched issue. The research findings indicate that according to Article 24 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, road administrators are required to repair damaged roads and provide traffic signs to prevent accidents if repairs cannot be immediately carried out. However, until now, Jember Regency does not have specific regulations or regional regulations (Perda) governing road damage handling, leading to various challenges in implementing road repair policies in the area.

Keywords: Policy, Traffic, Local Government.

